

## Sinergi SDGs dan Ekonomi Islam dalam Mencapai Kesejahteraan Global

**Annisa**

*UIN Madura, Indonesia*

*annisa.b3032@gmail.com*

### Abstrak

Pembangunan berkelanjutan menuntut sinergi antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan, namun implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) masih menghadapi hambatan seperti kemiskinan, kesenjangan, dan kerusakan lingkungan. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif berbasis nilai keadilan, etika, dan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi ekonomi Islam dalam mendukung pencapaian SDGs dengan metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap 45 artikel ilmiah. Hasil menunjukkan nilai inti ekonomi Islam sejalan dengan tujuan utama SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, pemerataan pendidikan, kesetaraan, kesejahteraan, serta perlindungan lingkungan. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan sukuk hijau berpotensi besar dalam mendukung SDGs, meski masih terbatas oleh regulasi, literasi rendah, dan dominasi sistem konvensional. Penelitian ini menegaskan relevansi ekonomi Islam terhadap agenda pembangunan global serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan dan praktik berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Ekonomi Islam; Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); Kesejahteraan*

### Pendahuluan

Seiring perkembangan peradaban manusia, pembangunan terus mengalami perubahan dan kemajuan. Tujuannya selalu mengarah pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Namun, di balik manfaatnya, pembangunan juga menimbulkan dampak negatif, terutama kerusakan lingkungan dan terganggunya ekosistem alam. Hal ini kemudian menjadi perhatian serius di banyak negara yang mulai menimbang ulang arah kebijakan pembangunan mereka. (Hermantoro and Zuraidah 2023). Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan inisiatif global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB sejak 2015 untuk membangun masa depan yang adil, makmur, dan lestari. (Febriyanti and Giantara 2025) Terdiri dari 17 tujuan dan 169 target, agenda ini berfokus pada penghapusan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan dunia hingga 2030. (Ald and Khairanis 2025) Walau telah diimplementasikan secara luas, banyak tantangan yang masih menghambat capaian target tersebut. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai pendekatan strategis yang mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, inklusivitas ekonomi, dan keberlanjutan. (Wahyuningsih 2018) Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah dalam satu dekade terakhir, baik bank maupun non-bank,

menunjukkan kontribusinya dalam menyediakan pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh kelompok masyarakat golongan bawah. (Usman et al. 2024)

Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan spiritual yang menekankan terciptanya kesejahteraan kolektif serta keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Sistem ini tidak hanya fokus pada aspek material, tetapi juga memperhatikan etika sosial dan tanggung jawab ekologis sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. (Ald and Khairanis 2025) Melalui instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan pelarangan riba, ekonomi Islam menyediakan mekanisme keuangan yang tidak semata-mata berfokus pada keuntungan ekonomi, melainkan juga mengedepankan pemerataan kesejahteraan serta kepedulian terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan. Pendekatan ini menciptakan sistem yang lebih inklusif dan etis dalam pengelolaan sumber daya. (Lukman Hakim, Birusman, and Nuryadin 2024)

Ekonomi syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat melalui pemerataan distribusi kekayaan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan menolak praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (spekulasi berlebihan), dan maysir (ketidakpastian atau perjudian), sistem ini menekankan keadilan dalam transaksi serta mendorong solidaritas sosial melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak hanya dipandang sebagai alternatif dari sistem konvensional, tetapi juga sebagai pendekatan transformatif yang mampu menawarkan solusi konkret terhadap berbagai tantangan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan, kemiskinan, dan krisis nilai (Huda 2025).

Relevansi ekonomi Islam semakin nyata ketika dikaitkan dengan berbagai sasaran dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mengatasi kemiskinan (SDG 1), mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi (SDG 10), serta mendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (SDG 13). Berdasarkan hal tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran strategis berbagai instrumen ekonomi Islam dalam mempercepat pencapaian target-target SDGs secara berkelanjutan dan inklusif.

Menurut laporan terbaru *World Bank*, Menurut laporan terbaru dari Bank Dunia, saat ini sekitar 700 juta orang di seluruh dunia—atau setara dengan 8,5% dari total populasi global—masih hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem, yaitu dengan pendapatan harian di bawah 2,15 dolar AS (Worldbank 2024). Di Indonesia sendiri, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada bulan September 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 8,57%. Meskipun tren tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, tantangan dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi tetap menjadi persoalan yang kompleks (BPS 2024). Sebuah survei yang dilakukan oleh Muhammad Aldi dan Retisfa Khairanis terhadap 120 mahasiswa dan praktisi ekonomi Islam mengungkapkan bahwa mayoritas responden yakni sebanyak 72% berpendapat bahwa potensi ekonomi dari instrumen-instrumen syariah seperti zakat dan wakaf belum dioptimalkan secara maksimal. Temuan ini mencerminkan masih

besarnya peluang untuk mengembangkan dan memanfaatkan instrumen keuangan syariah sebagai solusi strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi di masyarakat (Ald and Khairanis 2025)r.

Kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih tergolong rendah tetap menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui implementasi program pembangunan berkelanjutan yang menekankan prinsip keadilan sosial dan inklusivitas. Di samping itu, peran serta dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk kontribusi pemikiran dari para ahli ekonomi, baik yang berasal dari pendekatan konvensional maupun yang berbasis nilai-nilai ekonomi Islam memiliki signifikansi yang besar dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di Indonesia (Bakhri S, et al 2021). Kesejahteraan dapat dipahami sebagai suatu keadaan ideal di mana individu dan kelompok masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara menyeluruh baik dari segi material, spiritual, maupun sosial sehingga memungkinkan terciptanya kualitas hidup yang layak dan bermartabat (Dharmayanti and Abd Aziz 2024). Dalam konteks pembangunan, tujuan utama yang ingin dicapai adalah peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini mencakup dimensi ekonomi yang mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan, aspek sosial yang mencakup keadilan dan inklusi, serta dimensi lingkungan yang menekankan pada pelestarian sumber daya alam demi keberlangsungan hidup generasi mendatang (Fatmasari and et al 2022).

Pembangunan berkelanjutan, atau yang dikenal dengan istilah *Sustainable Development*, merujuk pada suatu proses pembangunan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka di masa depan. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kualitas hidup masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup. Menurut pandangan Mannion, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilaksanakan dalam kerangka kebijakan yang saling terintegrasi pada tataran internasional dan global. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan menuntut adanya pendekatan yang holistik dan interdisipliner, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keadilan antargenerasi dan keberlanjutan ekosistem secara global (Fatmawati and et al 2022).

Terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam terkait dengan konsep pertumbuhan ekonomi sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Haerisma and et al 2023). Paradigma ekonomi konvensional cenderung menitikberatkan pada pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun seringkali mengabaikan aspek pemerataan distribusi hasil produksi. Akibatnya, pertumbuhan yang dicapai tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan secara merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga ketimpangan sosial dan ekonomi tetap menjadi persoalan yang signifikan.

Sebaliknya, ekonomi Islam memandang pertumbuhan bukan semata-mata sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin umat manusia secara holistik. Dalam perspektif ini, pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan nilai-nilai etika dan keadilan distribusi, di mana kesejahteraan tidak hanya diukur berdasarkan peningkatan materi, tetapi juga pada terpenuhinya dimensi spiritual dan moral. Pendekatan ini bersifat inklusif, tanpa membedakan latar belakang ras, agama, atau kebangsaan, sehingga memberikan landasan filosofis yang lebih humanistik dalam mewujudkan keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi. (Usman et al. 24AD)

Penelitian terkini menunjukkan bahwa integrasi ekonomi Islam dapat memperkuat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Misalnya, penelitian terkini yang dilakukan oleh Abdul Aziz dan lainnya (Aziz and Dkk 2023) mengemukakan bahwa prinsip maqashid syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat menjadi dasar nilai dalam merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan holistik. Al Kahfi dan Muhamad Zen (Kahfi and Zen 2024) menyoroti potensi zakat dan wakaf sebagai instrumen ekonomi penting dalam berbagai aspek, termasuk dalam pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan zakat yang efektif dapat meningkatkan Indeks Maqashid Syariah melalui pemberdayaan ekonomi umat, seperti pengembangan usaha mikro, pembiayaan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan inisiatif produktif lainnya. Ubaid Ahmed Nadwi dan lainnya ( Ubaid Ahmed Nadwi et al. 2024) serta Obaidillah (Obaidullah 2018) menegaskan pentingnya distribusi kekayaan dan keuangan inklusif berbasis syariah untuk mengatasi ketimpangan. Model penggalangan dana ZISWAF berbasis korporasi yang berlandaskan pada maqashid syariah dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat, dengan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak untuk implementasinya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan dapat memperkuat pencapaian SDGs dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Menanggapi ketimpangan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi Islam dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan perspektif yang komprehensif mengenai bagaimana ekonomi Islam dapat berperan dalam mencapai SDGs. Dengan mengeksplorasi berbagai instrumen dan pendekatan yang digunakan, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur tentang ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dan lembaga keuangan syariah untuk memperkuat perannya dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengoptimalkan peran ekonomi Islam dalam mencapai SDGs, serta memberikan rekomendasi praktis bagi implementasinya.

## Metode

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dalam menganalisis literatur atau disebut dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) guna mengumpulkan data sekunder yang diperlukan. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui pengumpulan dan pengolahan oleh pihak lain dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal ilmiah, internet, dan dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami makna konsep yang diteliti serta memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang melingkupinya. Studi literatur merupakan metode sistematis dan terstruktur untuk menilai, menganalisis, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami peran ekonomi Islam dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai upaya mencapai kesejahteraan global.

### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel, jurnal, situs web, penelitian terdahulu, dokumen resmi, surat kabar, dan laporan perusahaan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan tanpa harus mengumpulkan data langsung dari lapangan.

### Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari analisis studi literatur. Analisis kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan fenomena berdasarkan data non-numerik, seperti buku, internet, dokumen, serta penelitian-penelitian terdahulu. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dan komprehensif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai topik yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebanyak 45 artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2015 hingga 2024 dianalisis secara sistematis. Artikel-artikel tersebut dipilih berdasarkan kriteria relevansi dan kualitas ilmiah dari berbagai sumber terpercaya, seperti Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar. Melalui proses identifikasi, seleksi, dan sintesis data literatur yang ketat, penelitian ini menemukan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara nilai-nilai inti dalam ekonomi Islam seperti keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab lingkungan dengan 17 butir Sustainable Development Goals (SDGs) yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua paradigma tersebut memiliki landasan etis dan visi kesejahteraan global yang saling bersinggungan, sehingga membuka ruang untuk integrasi yang lebih erat dalam praktik pembangunan berkelanjutan.

## Temuan Utama:

Berdasarkan hasil analisis literatur yang dilakukan secara sistematis, terdapat empat temuan utama yang mencerminkan hubungan erat antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

### 1. Kesesuaian Nilai-Nilai Fundamental

Sebagian besar artikel yang ditelaah sekitar 80% dari total sumber yang dianalisis menunjukkan adanya kesesuaian substansial antara nilai-nilai utama dalam ekonomi Islam dan indikator-indikator SDGs. Prinsip-prinsip seperti keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), pelarangan terhadap praktik riba, serta mekanisme distribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf, dipandang sebagai fondasi yang mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, sejumlah tujuan SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan (SDG 1), penyediaan pendidikan yang layak dan inklusif (SDG 4), serta peningkatan kesetaraan gender (SDG 5), memiliki keselarasan yang erat dengan kerangka maqashid syariah, yaitu lima tujuan utama dalam syariah Islam: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

### 2. Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Strategis

Sebanyak 60% artikel ilmiah yang dianalisis menyoroti potensi besar dari zakat dan wakaf produktif sebagai mekanisme pembiayaan alternatif dalam mendukung agenda SDGs. Secara khusus, pengelolaan yang tepat terhadap dana sosial Islam ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan pengurangan ketimpangan sosial (SDG 10). Melalui pendekatan yang produktif dan berorientasi pemberdayaan, zakat dan wakaf tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformasional dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat akar rumput.

### 3. Kritik Sistem Ekonomi Konvensional terhadap

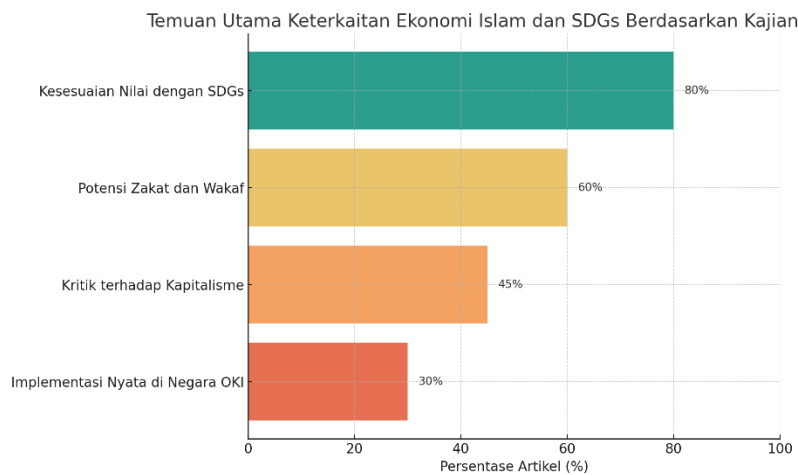
Beberapa artikel mengemukakan kritik tajam terhadap sistem kapitalisme global, yang dinilai justru memperlebar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam sistem tersebut, akumulasi kekayaan seringkali terjadi di tangan segelintir elit, sementara kelompok rentan semakin terpinggirkan. Sebaliknya, ekonomi Islam dipandang sebagai alternatif yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif, karena menekankan distribusi kekayaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab sosial sebagai prinsip utama. Dengan demikian, ekonomi Islam dinilai lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok marjinal dan mendukung inklusi sosial.

### 4. Keterbatasan Implementasi di Dunia Muslim

Meskipun secara konseptual terdapat korelasi positif antara SDGs dan ekonomi Islam, realitas implementatif di lapangan menunjukkan bahwa integrasi kedua kerangka tersebut masih terbatas. Hanya sekitar 30% dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang telah secara eksplisit menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam strategi nasional untuk

pencapaian SDGs. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi teoretis dan realitas praktis, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan kelembagaan, regulasi yang belum sinkron, serta kurangnya pemahaman dan komitmen politik dari pemangku kebijakan.

Berikut merupakan visualisasi temuan utama hasil kajian literatur mengenai keterkaitan antara Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs).



Sumber: Hasil olahan penulis (2025).

## PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi Islam dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) bukanlah dua entitas yang saling bertolak belakang, melainkan justru memiliki relasi yang sinergis dan dapat saling memperkuat dalam mewujudkan visi bersama menuju kesejahteraan global yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi Islam tidak semata-mata berorientasi pada aspek pertumbuhan ekonomi dalam arti sempit, melainkan menempatkan keadilan distributif, etika sosial, dan keberlanjutan antar-generasi sebagai komponen utama dalam kerangka pembangunan.

Nilai-nilai seperti ta'awun (kerja sama), tanggung jawab sosial, serta larangan eksploitasi dan penumpukan kekayaan secara tidak adil, memberikan fondasi moral yang kuat untuk mendorong pembangunan yang tidak hanya mengejar angka-angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam memberikan kontribusi substantif terhadap inti dari SDGs, yaitu pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang (*leave no one behind*), sekaligus menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Dalam tatanan global saat ini, semakin banyak pihak yang menyadari perlunya pendekatan pembangunan yang holistik, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip ekonomi Islam ternyata memiliki banyak kesamaan yang substansial dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Meskipun SDGs merupakan inisiatif global yang bersifat sekuler, dan ekonomi Islam bersumber dari ajaran agama,

keduanya saling berkaitan dan berorientasi dalam menciptakan kesejahteraan yang merata penghapusan kemiskinan dan pelestarian lingkungan untuk generasi masa depan.

## 1. Keadilan Sosial dan Distribusi Kekayaan

Salah satu landasan utama di dalam ekonomi Islam adalah keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan umat. (Ariswant et al. 2025) Islam mendorong sistem distribusi kekayaan yang tidak terkonsentrasi pada segelintir orang, melalui instrumen yang ada seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (Mubarok, M. Taufikurrahman, and Panorama 2024). Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya sekedar menjadi instrumen praktik keagamaan, tetapi telah terbukti menjadi mekanisme sosial ekonomi yang efektif dalam mendukung kelompok masyarakat miskin, rentan atau golongan bawah. Secara tidak langsung, instrumen tersebut memberikan kontribusi untuk mendukung beberapa tujuan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu pengentasan kemiskinan (SDGs 1), kelaparan (SDGs 2) dan berkurangnya kesenjangan (SDGs 10) (Ald and Khairanis 2025). Melalui pengelolaan instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf yang transparan dan efisien, serta pengembangan wakaf produktif, distribusi sumber daya dapat diarahkan untuk menjangkau komunitas atau kalangan marginal secara berkelanjutan. Lebih jauh, prinsip ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membantu sesama, menciptakan jaringan solidaritas sosial yang berperan sebagai pengaman sosial yang inklusif dan partisipatif.

## 2. Etika Ekonomi dan Stabilitas Keuangan

Ekonomi Islam sangat menekankan etika dalam transaksi ekonomi. Pelarangan praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (spekulasi) menciptakan sistem keuangan yang stabil dan bertanggung jawab (Tohari et al. 2024). Praktik keuangan syariah berorientasi pada kegiatan ekonomi riil dan produktif, yang berlandaskan transparansi, keadilan dan kebermanfaatn bagi semua pihak (Pusvisasari, Bisri, and Suntana 2023). Hal ini sejalan dengan tujuan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDGs 8) dan Industri, Inovasi dan Infrastruktur (SDGs 9) yang menuntut sistem ekonomi yang inklusif, tahan krisis dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sehingga prinsip-prinsip ekonomi Islam akan membantu membangun fondasi sistem ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan, terutama di tengah tantangan global seperti ketimpangan pendapatan dan ketidakstabilan keuangan konvensional (Afdal 2024).

## 3. Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Ajaran Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual sebagai khalifah di bumi yakni pengelola dan penjaga keberlangsungan alam. Konsep tawazun (keseimbangan), amanah (tanggung jawab) dan ihsan (kesempurnaan dalam berbuat) menggarisbawahi perlunya menjaga harmoni antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan (Widiastuty, Hesty, and Anwar 2025). Secara tidak langsung, ajaran Islam tersebut memberikan kontribusi untuk mendukung beberapa tujuan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu Penanganan Perubahan Iklim (SDGs 13), Ekosistem Lautan (SDGs 14) dan Ekosistem Daratan (SDGs 15). Dalam praktiknya, pendekatan Islam terhadap lingkungan mencakup larangan eksploitasi

berlebihan terhadap sumber daya, pentingnya konservasi, dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam aktivitas ekonomi (Zein et al. 2025). Hal tersebut memberikan alternatif model pembangunan yang menghormati batas-batas ekologis bumi.

#### 4. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Inklusivitas

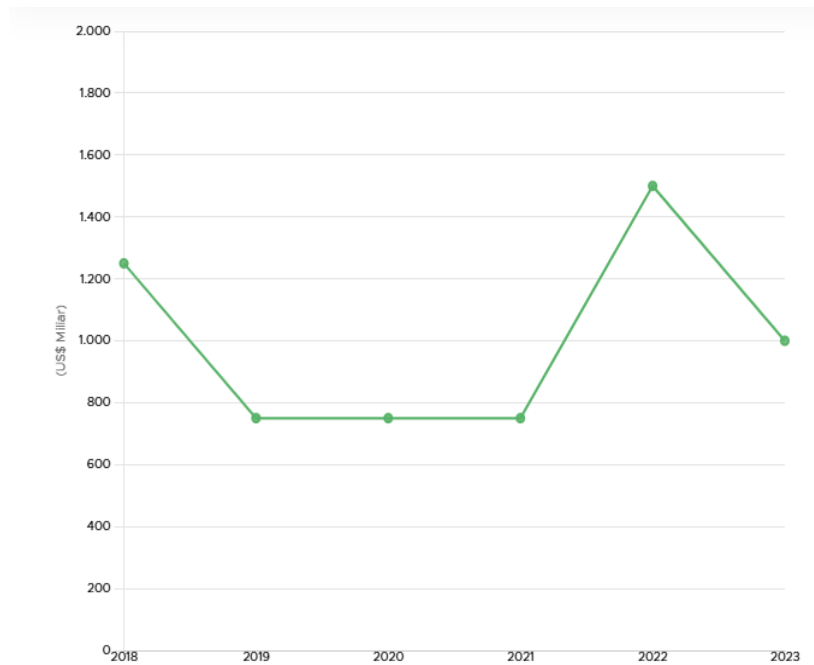
Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia (Syakdiyah, Sofa, and Sugianto 2025). Pendidikan yang merata dan berkualitas tidak hanya dianggap sebagai hak, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif umat. Prinsip tersebut bersinergi erat dengan untuk mendukung beberapa tujuan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu Pendidikan Berkualitas (SDGs 4) yang menekankan akses pendidikan yang inklusif dan setara melalui penguatan nilai-nilai etika dan moral yang penting dalam pembagunan kualitas manusia. Begitupun dengan Kesetaraan Gender (SDGs 5) yang mendorong pemberdayaan perempuan dalam semua aspek kehidupan (Ald and Khairanis 2025). Ekonomi Islam mendorong pembangunan manusia yang berkualitas secara utuh, termasuk dalam pemberdayaan kelompok/golongan bawah, melalui keterampilan, penciptaan lapangan kerja yang layak dan akses pembiayaan mikro berbasis syariah. Hal ini membuka jalan bagi transformasi sosial yang lebih adil dan inklusif.

#### Peran Instrumen Ekonomi Islam dalam Mendukung Keberlanjutan Ekonomi dan Sosial (SDGs)

Instrumen ekonomi Islam memiliki potensi signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Karakteristik utama ekonomi Islam mengedepankan prinsip keadilan, transparansi serta larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (spekulasi) menjadikan sistem ini relevan dengan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan (Abdullah Aryasatya Putra M et al. 2024). Sebagai bentuk keuangan etis, keuangan Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata melainkan juga menekankan aspek sosial dan kemaslahatan umum (Anzaikhan and et al 2025). Salah satu kontribusi nyata instrumen keuangan Islam terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dapat dilihat dari peran zakat, wakaf dan sukuk hijau (Maskhuri 2024). Zakat sebagai kewajiban ibadah yang bersifat distribusional, berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat sistem jaminan sosial (Diab 2023). Dana zakat yang dikelola secara optimal dapat dialokasikan atau didistribusikan untuk sektor-sektor yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) seperti pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Menurut BAZNAS, potensi zakat di Indonesia mencapai lebih dari Rp. 300 triliun/tahun (Baznas Jogja 2025). Jika dikelola secara optimal, zakat dapat menjadi solusi dalam menekan angka kemiskinan, kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tidak hanya itu, dana zakat tersebut juga berpotensi menjadi sumber pembiayaan alternatif dalam pembangunan kualitas pendidikan. Di sisi lain, wakaf merupakan instrumen filantropi yang memiliki potensi jangka panjang dalam pembiayaan sosial dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan (Abiba and Suprayitno 2023). Menurut Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur menyampaikan potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp. 180 triliun/tahun, namun realisasinya sangatlah minim yaitu baru mencapai Rp. 2,3 triliun (Ghafur 2024). Dengan pengelolaan yang profesional dan modern, wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun

rumah sakit, sekolah serta fasilitas publik lainnya. Sehingga secara tidak langsung berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yaitu SDGs 3 (kesehatan yang baik dan kesejahteraan), SDGs 9 (industri, inovasi dan infrastruktur) serta SDGs 11 (kota dan komunitas berkelanjutan). Adapun sukuk hijau merupakan inovasi dari pasar modal syariah yang dirancang untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan (Rohaini, Rifantini, and Mashudi 2024). Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia telah menerbitkan green sukuk sebagai instrumen pembiayaan untuk proyek energi terbarukan, transportasi hijau dan pelestarian lingkungan (Aziz and Dkk 2023). Sukuk hijau/green sukuk merupakan instrumen yang semakin berkembang dalam kerangka SDGs. Indonesi menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan sukuk hijau berdaulat (sovereign green sukuk) pada tahun 2018 (PPID, n.d.). Sejak pada ssat itu, gren sukuk mendanai proyek ramah lingkungan untuk mencapai tujuan pembagunan berkelanjutan. Hingga tahun 2024, total penerbitan sukuk Indonesia telah mencapai 5,5 Triliun yang digunakan dalam berbagai proyek (DJJPR 2023). Dalam literatur lain menyatakan indek nilai green sukuk global di Indonesia tahun 2018-2023, sebagaimana dijelaskan oleh grafik dibawah ini (Goodstats, n.d.):



Grafik diatas menjelaskan bahwa penerbitan green sukuk global sejak tahun 2018-2023 mencapai nilai US\$6 miliar. Namun demikian, efektivitas instrumen-instrumen keuangan Islam dalam mendukung SDGs sangat bergantung pada dukungan regulasi, kapasitas institusional, serta sinergi antar sektor publik dan swasta. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong integritas keuangan Islam dalam kerangka pembangunan nasional dan internasional yang lebih luas, termasuk harmonisasi standar pelaporan

keberlanjutan, insentif fiskal untuk investasi berbasis syariah dan peningkatan literasi keuangan Islam di tingkat masyarakat.

### **Tantangan dan Strategi Implementasi Ekonomi Islam dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**

Mengintegrasikan nilai-nilai prinsip ekonomi Islam ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan merupakan proses yang kompleks dan tidak terlepas dari berbagai hambatan maupun tantangan konseptual maupun praktis.

**Tabel 1**

**Tantangan dan Hambatan dalam Integrasi Ekonomi Islam dan Agenda SDGs**

<b>No</b>	<b>Aspek Kritis yang Muncul</b>	<b>Tantangan Utama</b>	<b>Hambatan yang Dihadapi</b>
1	Kesadaran dan Pemahaman Kolektif	Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran di kalangan masyarakat, pemimpin, serta pelaku ekonomi	Kurangnya persepsi atas manfaat ekonomi Islam menyebabkan resistensi terhadap penerapannya dalam praktik pembangunan
2	Kepastian Regulasi dan Payung Hukum	Tidak semua negara memiliki sistem hukum yang ramah terhadap entitas dan instrumen ekonomi syariah	Ketidaktepatan regulasi menghambat legalitas operasional lembaga keuangan syariah dan menurunkan kepercayaan investor
3	Infrastruktur Keuangan Syariah yang Terbatas	Minimnya lembaga keuangan dan produk investasi yang kompatibel dengan prinsip syariah	Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, sistem ekonomi Islam sulit berkembang secara sistemik dan berkelanjutan
4	Dominasi Sistem Konvensional	Sistem ekonomi dan keuangan konvensional masih menjadi arus utama di banyak negara	Ketidaktepatan paradigma membuat prinsip syariah sulit mendapatkan tempat dalam kebijakan arus utama
5	Literasi dan Pendidikan Ekonomi Islam	Kurangnya program pendidikan dan pelatihan yang	Rendahnya pemahaman teknis dan filosofis menghalangi pelaku usaha

		mengangkat ekonomi Islam sebagai bagian dari kurikulum	dan regulator untuk mengadopsi ekonomi Islam secara utuh
6	Dinamika Global dan Tantangan Eksternal	Faktor eksternal seperti perubahan iklim, geopolitik, dan krisis ekonomi global memengaruhi stabilitas	Perlunya adaptasi cepat agar prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan aplikatif dalam konteks global yang terus berubah
7	Kesulitan Evaluasi dan Indikator Kinerja	Sulitnya mengukur dampak ekonomi Islam dengan kerangka evaluasi pembangunan konvensional	Keterbatasan alat ukur khusus menimbulkan kendala dalam menunjukkan kontribusi nyata ekonomi Islam terhadap SDGs

Sumber: Diadaptasi dan disusun ulang dari Aji Damanuri dan Eva Rosyidah (2024), dengan pengembangan oleh penulis (Damanuri and Rosyidah 2024).

Strategi untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam penerapan ekonomi Islam dalam kerangka tujuan pembangun berkelanjutan memerlukan pendekatan terpadu dan kolaboratif lintas sektor. Salah satu langkah strategis yang krusial adalah memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi dan sektor industri. Pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan publik yang kondusif bagi pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah, termasuk melalui penyediaan stimulus fiskal, dukungan regulatif yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah serta penciptaan iklim investasi yang mendukung lembaga keuangan Islam. Di sisi lain, keterlibatan institusi akademik menjadi penting dalam menghasilkan riset-riset ilmiah yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dalam konteks praktis, para pelaku industri dituntut berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer (Ald and Khairanis 2025). Melalui kolaborasi yang erat antar elemen tersebut, ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan-tujuan global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs)

## Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa nilai-nilai ekonomi Islam memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Tidak hanya itu, beberapa instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf produktif dan green sukuk tidak hanya kompatibel dengan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), bahkan menjadi pendorong utama dalam transformasi atau pembangunan ekonomi yang adil, inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas pengintegrasian antara nilai-nilai ekonomi Islam dengan Sustainable Development Goals (SDGs) sangat perlu dukungan regulasi, literasi ekonomi syariah serta sinergi pemerintah, akademisi dan sektor industri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integritas nilai-nilai ekonomi Islam ke dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) bukan hanya

kemungkinan, akan tetapi juga penting sebagai pendekatan alternatif yang lebih adil, etis dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan kesejahteraan umat manusia secara holistik.

**Daftar Pustaka**

- Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2023). Riska Widya Abiba dan Eko Suprayitno. “Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGS Melalui Pemberdayaan Peternakan. *Al-Intaj*, 9(1), 109–123.
- Afdal, D. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Al-Azhar, M. F., Wahid, A., & Ahfadz, M. U. (2024). Peran Zakat Produktif Dalam Membangun Ekonomi Inklusif Di Daerah Tertinggal. *Tijaratana*, 5(2), 1–13.
- Ald, M., & Khairanis, R. (2025). *Ekonomi Islam dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs*. 2(1b), 2408–2416.
- Alfian, A. M., Jaswir, I., Wira, A., & Novia, A. (2025). Peran Keuangan Sosial Islam Dalam Mencapai Sustainable Development Goals. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 511–522.
- Anzaikhan, M., & Al, E. (2025). Teologi Ekonomi Islam ; Kontruksi Prinsip Ilahiyah menuju Aktualisasi Bermuamalah. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 177–192.
- Ariswant, D., Zubaidah, S., Chalid, F. I., & Nurhisna. (2025). Konsep Etika Dalam Kegiatan Distribusi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(1), 1–12.
- Aziz, A., & Dkk. (2023). *Ekonomi Islam dan Penguatan Keuangan Ekonomi Global*. Jejak Pustaka.
- BPS. (2024). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>.
- D, D., & A, A. (2024). Transaction Halal Supply Chain Management (HSCMT) in the Digital Economy Era An Opportunity and a Challenge In Indonesia. *Migration Letters*, 21(4), 1410–1419.
- D, F., D, H., & A, H. (2022). Error Correction Model Approach As A Determinant Of Stock Prices. *Trikonomika*, 21(2), 84–91.
- Damanuri, A., & Rosyidah, E. (2024). Kontekstualisasi Filsafat Ekonomi Islam Dalam SDGS. *Journal Syntax Idea*, 6(6), 2517–2534.
- Diab, A. L. (2023). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Yayasan Cipta Anak Bangsa.
- DJJPR. (2023). <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/laporankinerja>.
- Febriyanti, D., & Giantara, F. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Pendekatan Multidisiplin. *Diniyyah International Conference*, 1(1), 53 – 61.
- Ghafur, W. A. (2024). *No Title*<https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp180-t-kemenag-perkuat-kualitas-nazir-dan-kebijakan-tata-kelola-wakaf-uang-nNKZD>.
- Goodstats. (n.d.). <http://data.goodstats.id/statistic/indeks-nilai-green-sukuk-global-di-indonesia-tahun-2018-2023-7XyWH>. Goodstats.
- Hakim, L., Birusman, M., & Nuryadin. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern;Pemikiran Umer Chapra. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 339–349.

- Hasibuan, T., Adik, Anantha, A., Damanik, I. J., & Zein, A. W. (n.d.). Falah Sebagai Tujuan Akhir Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 526–536.
- Hermantoro, B., & Zuraidah. (2023). Peranan Lembaga Filantropi Rumah Zakat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Di Kota Kediri. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 7(1), 42–49.
- Huda, N. (2025). Peran Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Tashfir Terateks: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, 1(1), 77–96.
- Jogja, B. (2025). <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/39047/zakat-indonesia-model-pengelolaan-yang-diakui-dunia>.
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer: Analisis Fiqh Muamalah. *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, 7(4), 631–649.
- Kuangan, O. J. (2022). *No Title*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Februari-2022.aspx>
- M, A. A. P., Akbar, D., Wicaksana, D. H., & Wigati, S. (2024). Relevansi dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Era Ekonomi Digital. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(5), 498–517.
- Maskhuri. (2024). Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 2056–2060.
- Mubarak, M. H., M. Taufikurrahman, & Panorama, M. (2024). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 301–318.
- N, F. P., A, J., & S, R. (2022). Analysis of Factors Affecting Employee Performance. *American Journal of Current Education and Humanities*, 1(1), 44–63.
- Nadwi, U. A., Ma'ruf, A., Alam, S., & Azizah, L. (2024). The Role of Islamic Finance in Sustainable and Green Transition. *International Journal of Islamic Studies*, 36(2), 118–139.
- Obaidullah, M. (2018). Managing Climate Change: Role of Islamic Finance. *Islamic Economic Studies*, 26(1), 31–62.
- PPID. (n.d.). <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4654/indonesia-terbitkan-green-sukuk-pertama-di-dunia>.
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal ASTINA Mandiri*, 2(3), 269–277.
- Rohaini, J., Rifantini, A., & Mashudi. (2024). Peran Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Green Sukuk di Indonesia. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik Dan Pemerintahan*, 1(3), 1–18.
- S, B., L, L., & I, A. M. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1–22.
- S, H. A., S, A., & Muslim, A. (2023). Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2), 298–316.

- Siagiana, R. R. A.-A., & Nasution, Y. S. J. (2024). . “Peran Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Muslim.” , vol, 2, no. 3 (2024): *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(3), 782–787.
- Syahputra, D. H., Pratama, M. A., Zein, A. W., & Putra, M. R. (2025). Rekonstruksi Nilai Filosofis dalam Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Universal. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 246–254.
- Syakdiyah, H., Sofa, A. R., & Sugianto, M. (2025). Keutamaan Ilmu Sebagai Fondasi Dalam Membangun Peradaban Islam Di Era Modern: Perspektif Nilai Dan Relevansi Kontemporer. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 4(1), 43–54.
- T, H. (2022). Harmonisasi Nilai-nilai Islam dengan SDGs dalam Perspektif Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Lingkungan Dan Pembangunan*, 4(2), 90–101.
- Tohari, Mustofa, Ariansyah, A., & Rahmani, Z. (24 C.E.). Tohari, Mustofa, Ary . “Implementasi Akhlak Alkarimah Di Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 5(2).
- U, U., W, W., N, H., & N, W. (24 C.E.). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 12(1), 108–126.
- Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Developpment Goals (MDGS) dan Sustainable Development Goals (SDGS) dalam Kesejahteraan Sosial. *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 390–399.
- Widiastuty, Hesty, & Anwar, K. (2025). Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur’an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi*, 11(1), 465–480.
- Widyaningrum, R. A. (2020). *Analisis Penerapan Green Banking Pada Bri Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun*. IAIN Ponorogo.
- Worldbank. (2024). <https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-prosperity-and-planet>.
- Yunilhamri, M. S., Wahyudi, Syahpawi, & Albahi, M. (2024). Paradigma Karakteristik Ekonomi Syariah. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(4), 329 – 347.
- Zein, W., Ahmad, Andriyani, E., Zahra, A. A., & Anggraini, W. (2025). Studi Kualitatif Tentang Peran Filsafat Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Digital Bisnis : Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 4(1), 101–114.